

KONTESTASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KAKI PURA ARGA SUNYA

CONTESTATION OF RELIGIOUS COMMUNITY AT THE PURA ARGA SUNYA

Moch. Lukluil Maknun

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang
Lukluilmaknun84@gmail.com

Artikel diterima 30 Agustus 2019, diseleksi 14 April 2020, dan disetujui 23 Oktober 2020

Abstract

Religious harmony is still being encouraged by the Indonesian government in the middle of some disharmony conditions in some areas. When the temple cliff in Pura Agung Arga Sunya in Krisik Village, Blitar was having landslide, the interfaith society helping hand in hand to get over it. It is interesting to find out the religious harmony model conducted by those interfaith society. This qualitative study was built based on the perception of the motives in having religious interfaith teamwork, local wisdom, also the actors and agents contestation. Using oral tradition and neo-ethnography analysis, this study try to explore the religious harmony practice around the Pura Arga Sunya Blitar, to find out the influenced factors of the harmony success, and to formulate the harmony model they used. First, the religious harmony practice in Krisik Village, which is potential to be latent conflict, still can be maintained by the society through strengthening the friendship and social brotherhood. Eventhough it seems to be just a pseudo-harmony, but it can fulfill enough the Indonesian religious society needs. Second, besides the religious doctrines, local wisdom has proven to have a significant role in maintaining religious harmony. Third, the religious model which can be adopted from them are: doing geographical and historical village awareness construction, strengthening and implementing local wisdom participation and role contestation in maintaining harmony, also creating and defining the harmony momentum.

Keywords: *religious harmony, local wisdom, Pura Agung Arga Sunya*

Abstrak

Kerukunan umat beragama menjadi topik yang terus digiatkan oleh pemerintah di tengah kondisi yang masih banyak memunculkan keadaan sebaliknya. Mengangkat model kerukunan umat beragama di daerah, seperti yang terjadi saat momentum kerja bakti lintas agama pasca longsornya tebing Pura Agung Arga Sunya di Desa Krisik, Blitar menjadi menarik. Kajian kualitatif ini disandarkan pada persepsi motivasi kerjasama umat beragama, *local wisdom*, serta kontestasi agen dan aktor. Dengan memanfaatkan analisis studi tradisi lisan dan etnografi baru, kajian ini berupaya mengeksplorasi praktik kerukunan umat beragama di sekitar Pura Arga Sunya Blitar, mencari faktor yang mempengaruhi keberhasilan penciptaan kerukunan, dan merumuskan model kerukunan di sana. Kajian ini setidaknya berhasil menjawab tiga pertanyaan di atas. Pertama, praktik kerukunan umat beragama yang memiliki potensi konflik laten di Desa Krisik dapat dipertahankan dengan penguatan silaturahmi dan jalinan persaudaraan sosial yang meskipun dimungkinkan masih berupa kerukunan semu, tetapi dapat mencukupi tuntutan kebutuhan sebagai masyarakat sosial beragama di Indonesia. Kedua, terbukti bahwa nilai kearifan lokal memiliki peran penting selain nilai ajaran agama dalam mempertahankan kerukunan umat beragama. Ketiga, rumusan model pencipta kerukunan yang dapat diadopsi di antaranya: melakukan konstruksi kesadaran geografis dan sejarah desa, penguatan dan penerapan kearifan lokal, partisipasi dan kontestasi peran dalam menjaga kerukunan, serta menciptakan dan memaknai momentum kerukunan.

Kata Kunci: Kerukunan umat beragama, kearifan lokal, Pura Agung Arga Sunya

PENDAHULUAN

Kerukunan umat beragama menjadi hal penting yang terus digalakkan pemerintah, tetapi fenomena sebaliknya masih banyak terjadi di masyarakat Indonesia. Kementerian Agama bahkan sudah membuat panduan buku panduan moderasi beragama sebagai model dan metode mengaplikasikan kerukunan di masyarakat. Data-data intoleransi antarumat beragama dapat ditemukan di berbagai media beberapa tahun terakhir ini. *Imparsial (Indonesian Human Right Monitor)* misalnya menyebutkan selama 2019 terdapat 31 kasus intoleransi atau pelanggaran kebebasan beragama dan keyakinan di Indonesia seperti pelarangan pendirian tempat ibadah, larangan perayaan kebudayaan etnis, perusakan tempat ibadah, hingga penolakan bertetangga kepada yang tidak seagama (Gatra, 2019). Sementara itu, Lukman Hakim Saifuddin, selaku Menteri Agama periode sebelumnya mendeklarasikan 2019 sebagai Tahun Moderasi Beragama, sejalan dengan penetapan PBB yang menjadikan 2019 sebagai "The International Year of Moderation" (Kemenag-R.I, 2019). Melihat hal ini, penggalian dan kajian model toleransi dan moderasi umat beragama layak dilakukan.

Kajian-kajian moderasi, toleransi, maupun intoleransi umat dan antarumat beragama yang sudah ada lebih banyak menyandarkan pada konsep Islam (Aslati, 2012; Bakar, 2015; Ghazali, 2016; Nisa' & Tualeka, 2017; Suryan, 2017; Suryana, 2011). Baru beberapa kajian yang mencoba mengkomparasikan dan mengkaji moderasi beragama dari dua agama atau lebih, dan seringnya dijumpai dengan lokasi kajian di pulau Bali (Armini, 2017; Muslim & Mujab, 2019; Parasmita, 2017; Wulandari, 2017). Terkait hubungan Muslim-Hindu di Bali, posisinya adalah Hindu sebagai mayoritas, sehingga kajian yang memposisikan Hindu sebagai

minoritas lebih mudah diangkat dari pulau lain, termasuk Jawa.

Di antara komunitas Hindu sebagai minoritas yang dapat hidup dengan harmonis dengan umat muslim sebagai mayoritas dapat ditemukan di Desa Krisik, Blitar. Potret harmoni umat beragama di desa ini mencuat ke permukaan setelah fenomena kerjabakti lintas agama memperbaiki tebing pura Agung yang longsor di desa tersebut diungkap oleh beberapa media (Hadi & Sucipto, 2019; Hasani, 2019). Fenomena inilah yang kemudian menjadi momentum yang memantik keingintahuan peneliti untuk menggali lebih dalam harmoni umat beragama di Desa Krisik. Peneliti juga berasumsi bisa saja kerukunan umat beragama di desa ini sudah berjalan sejak lama, tetapi masyarakat secara umum tidak lagi menyadari alasan, sebab, atau sejarah yang mengikat terciptanya kerukunan umat beragama di sana. Selain itu, peneliti juga ingin menguji konsep keberadaan modal sosial dan kultural yang diklaim sebagai pengusung moderasi beragama, yaitu bahwasanya di semua agama diajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal (Kemenag-R.I, 2019).

Tujuan kajian ini melengkapi celah dari studi terdahulu tentang kerukunan umat beragama yang sudah ada. Kajian ini lebih difokuskan pada studi kasuistik yang dikaitkan dengan pondasi kearifal lokal. Sejalan dengan itu tiga pertanyaan dapat dirumuskan: a) Bagaimana praktik fenomena kerukunan umat beragama di sekitar Pura Arga Sunya; b) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan terciptanya kerukunan umat beragama di sana; c) Bagaimana model kerukunan beragama di sana yang dapat dirumuskan dan diadopsi oleh masyarakat yang memiliki pluralitas pemeluk agama. Ketiga jawaban atas pertanyaan tersebut yang akan dibahas dalam kajian ini.

Tulisan ini berangkat dengan asumsi awal bahwa, *pertama*, kerukunan yang ada di masyarakat Desa Krisik adalah kerukunan semu karena di masyarakat dimungkinkan terdapat konflik laten yang bisa saja hal itu muncul ke permukaan. *Kedua*, bentuk keberhasilan dari terciptanya kerukunan beragama disebabkan oleh *local wisdom* yang melekat pada masyarakat Jawa yang cenderung bersikap *tepo seliro* dalam bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. *Ketiga*, desain kerukunan dapat terjadi karena kontestasi pewarisan dan pemeliharaan atas *local wisdom* yang dijaga oleh para aktor dan agen yang memiliki posisi-posisi tertentu.

Kerukunan Semu

Kerukunan tidak jauh berbeda maknanya dengan konsep damai dan harmoni yang selalu menjadi impian setiap orang untuk memperoleh ketenangan hidup dan jaminan keamanan dari segala ancaman kekerasan, kejahatan, dan peperangan yang seringkali menghambat terputusnya persaudaraan dan persahabatan antara sesama manusia (Takdir, 2017). Salah satu tulisan yang mengklasifikasikan kerukunan atau harmoni adalah Lestari, dkk. Setelah mengamati satu sudut kehidupan masyarakat Jawa yang diwakili daerah Surakarta Jawa Tengah, ia berhasil menyumbangkan dengan sangat sederhana contoh konsep harmoni semu dan harmoni hakiki (Lestari et al., 2013).

Harmoni semu digambarkan sebagai menjaga hubungan yang harmonis dengan orang lain dengan mengubur konflik yang belum selesai dalam hubungan. Keharmonisan semu biasanya terjadi ketika individu ingin memiliki kehidupan sosial yang tampaknya sempurna, maka ia memilih untuk menekan perasaan negatif dan mempertahankan harmoni bahkan jika itu tidak tulus. Dalam budaya

Jawa, istilah ini disebut *ben ketok rukun* (agar terkesan harmonis). Dalam harmoni semu, mudah ditemukan indikator harmoni seperti mengunjungi orang lain atau berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, tetapi tidak didasari ketulusan dan manajemen konflik. Harmoni kedua adalah *harmoni hakiki* yang digambarkan dengan menjaga hubungan yang harmonis dengan orang lain disertai empati. Indikator harmoni hakiki adalah selain ditemukannya indikator harmoni semu, ditemukan pula esensi empati/ketulusan di dalamnya.

Sebagai contoh, pengalaman Nyonya Arni dianiaya ketika dibesarkan oleh bibinya masih melekat di benaknya. Karena dibesarkan oleh bibinya, Nyonya Arni takut para tetangga akan menyalahkannya dan menganggapnya sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih. Merasa begitu, Nyonya Arni memilih untuk berperilaku harmonis dan baik terhadap bibinya, meskipun pada kenyataannya dia menekan perasaan sejatinya. Dalam hal ini, Nyonya Arni menghormati atau menyayangi bibinya sebatas formalitas (Lestari et al., 2013).

Keadaan sebaliknya atau disharmoni bagi orang Jawa setidaknya dapat dirunut dari tiga indikator. a) *Memutus hubungan*: ketika seorang individu tidak mau saling berkunjung, atau individu yang memilih untuk tidak berpartisipasi dalam kegiatan komunal seperti mengikuti kegiatan lingkungan, mengunjungi tetangga yang sakit, menghadiri acara masing-masing, atau membantu tetangga, maka ia dilihat oleh masyarakat sebagai berperilaku tidak harmonis. b) *Mengubur konflik atau konflik laten*: hal ini di antaranya disebabkan oleh kecemburuan, prasangka, menyalahkan orang lain sebagai pembalasan, dan keegoisan. Konflik yang terkubur atau laten dapat menyebabkan gangguan dalam hubungan sosial yang merugikan. Jika ini dibiarkan, itu akan mengakibatkan

konflik terbuka. c) *Konflik terbuka*: terjadi saat seseorang atau komunitas tidak dapat lagi mengelola konflik dengan baik. Hal ini akan menyebabkan situasi yang tidak harmonis seperti, pertengkaran, konflik fisik, dan mengabaikan satu sama lain (Lestari et al., 2013).

Local Wisdom

Nilai kearifan lokal menjadi modal yang sudah dimiliki oleh masyarakat sebagai pendukung bersikap moderat dan toleran. Kearifan lokal dapat dimaknai sebagai gagasan, nilai, dan tindakan yang menjadi kebudayaan suatu daerah dengan keunikan dan kekhasan yang luar biasa. Gagasan atau nilai tersebut bisa juga berasal dari tradisi dan kepercayaan masyarakat berdasarkan pengalaman hidup di suatu daerah yang masih mempertahankan kebudayaan sebagai hasil karya, cipta, dan karsa mereka. Kearifan lokal mencerminkan kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan luar yang memberikan tekanan terhadap tradisi yang ada di masyarakat (Takdir, 2017). Kearifan lokal sebagaimana pendapat Maryani dalam (Basyari, 2014) yang berupa energi/rasa (*sense*) untuk dalam bentuk jatidiri, solidaritas, rasa saling memiliki, dan kebanggaan bangsa dibutuhkan untuk mewujudkan kebesaran dan kesejahteraan.

Kearifan lokal dianggap penting karena memiliki pengaruh bagi bangsa. Di antara peran dan fungsi kearifan lokal adalah sebagai berikut; 1) konservasi dan pelestarian sumber daya alam; 2) pengembangan sumber daya alam; 3) pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan; 4) sebagai sumber petuah/kepercayaan/sastra dan pantangan; 5) sebagai sarana membentuk membangun integrasi komunal; 6) sebagai landasan etika dan moral; dan 7) fungsi politik (Basyari, 2014).

Salah satu contoh kasus kearifan lokal yang berperan dalam kehidupan misalnya dapat berfungsi sebagai mitigasi bencana di Kampung Naga Tasikmalaya. Kearifan lokal, dalam bentuk filosofi hidup, sikap, dan pedoman perilaku masyarakatnya terbukti membantu mereka bertahan dari berbagai ancaman yang mengganggu mereka dari bencana alam dan dinamika kehidupan. Masyarakat Kampung Naga menerapkan kearifan lokal dalam mitigasi bencana, seperti tanah longsor, kekeringan, dan polusi. Masyarakat menyadari bahwa bencana akan terjadi jika lingkungan mereka rusak. Kearifan lokal mereka dalam mitigasi bencana dapat dilihat dalam bentuk warisan arsitektur, tata guna lahan, serta manajemen lahan untuk lingkungan yang berkelanjutan (Maryani & Yani, 2018).

Kontestasi Agen dan Aktor

Terwujudnya kerukunan umat beragama tidak lepas dari adanya kontestasi agen atau tokoh yang berperan aktif. Tokoh berfungsi sebagai katalisator dalam mengayomi dan merangkul semua orang untuk bersatu dalam mewujudkan kehidupan yang penuh persaudaraan dan perdamaian. Tokoh juga merupakan pihak yang diharapkan mampu memimpin dan mengarahkan masyarakat untuk menahan gejolak demi menciptakan kedamaian (Takdir, 2017).

Kontestasi memang lebih mudah dimaknai sebagai persaingan untuk memperebutkan sesuatu dengan perjuangan. Kontestasi tidak dapat dilepaskan dari ranah/arena sosial tempat memperebutkan sumber yang terbatas. Kontestasi dilakukan oleh setiap agen untuk meningkatkan posisi dalam penguasaan modal kultural, simbolik, ataupun ekonomi. Selanjutnya, aktor

yang berperan melakukan kontestasi ini mengandalkan modalitas yang dimiliki untuk berani maju berkontestasi (Khatib, 2016). Meskipun pemaknaan kontestasi dan agen-aktor secara umum cenderung konotatif, tetapi penulis condong untuk memaknainya sebagai peran atau persaingan yang dapat diubah ke dalam hal positif, yaitu berlomba saling menguatkan dan menciptakan kebaikan yang dalam konteks kajian ini adalah kerukunan umat beragama.

Tokoh agama setidaknya memiliki otoritas dari tiga sumber. Pertama, pengakuan masyarakat terhadap kapabilitas tokoh dalam melaksanakan tugasnya. Kedua, otoritas dari struktur eklektik (penunjukan) melalui proses tertentu yang tidak setiap orang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai sebagai tokoh. Ketiga, otoritas negara berdasar pengangkatan atau penunjukan kepada posisi birokrasi yang diciptakan negara (Takdir, 2017).

Tokoh tidak bekerja sendiri dalam menjalankan tugas dan mewujudkan misinya. Seperti dicontohkan dalam menciptakan kerukunan umat beragama Islam-Kristen di NTT, para tokoh mendapat bantuan dan dukungan dari majelis pemimpin lima agama serta peran generasi muda. Fungsi koordinasi dan penghubung antar umat dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Persatuan gereja Indonesia (PGI), Perwakilan Umat Budha, dan Parisada Hindu Dharma. Adapun para generasi muda ikut turun melakukan kampanye kerukunan, promosi anti kekerasan, serta dialog keagamaan (Takdir, 2017).

METODE

Isu KUB (Kerukunan umat beragama) ini dipilih sesuai dengan misi

Kementerian Agama yang mengangkat tema moderasi beragama. Lokasi kajian dipilih sebagai representasi potret KUB Hindu-Muslim di daerah Hindu sebagai minoritas yaitu di Desa Krisik Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. Pengumpulan data dilakukan pada bulan November 2019.

Penelitian kualitatif ini bersandar pada data tiga persepsi: motivasi kerjasama antaragama; persepsi tentang peran *local wisdom*, serta kontestasi agen dan aktor. Teknik analisis yang digunakan selain analisis studi tradisi lisan dan etnografi baru adalah kajian kritis.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, studi dokumen, dan FGD (*focus group discussion*). Penelusuran awal dilakukan dengan wawancara dan diskusi bersama para wartawan penulis berita kerja bakti di pura Arga Sunya yang bermukim di Blitar –yang juga merupakan kota kelahiran penulis-, dosen, serta jaringan alumni sekolah. Secara *snowball* kemudian didapatkan nama-nama dan kontak informan terkait pura dan tokoh di Krisik yang dapat ditemui dan dimintai data. Observasi dimanfaatkan untuk memotret kondisi pura, kondisi sosial masyarakat, serta hubungan umat yang berbeda agama di Krisik. Studi dokumen dilakukan untuk mencermati sumber data pendukung baik berupa profil desa, berita terkait pura dan proses kerja bakti di media cetak, media online, serta informasi di akun media sosial. Tahapan pengumpulan data terakhir adalah diskusi terfokus dengan para tokoh yang mewakili pelaku sosial hubungan kerukunan umat beragama Hindu-Muslim di Desa Krisik serta para tokoh dan perangkat desa. Diskusi ini selain sebagai pengumpul data juga sekaligus sebagai langkah untuk melakukan kroscek data sementara yang sudah terkumpul.

PEMBAHASAN

Pengantar menuju Pura Agung Arga Sunya

Sebelum mendeskripsikan temuan yang menjadi jawaban dari permasalahan kajian ini, disampaikan pengantar untuk mengenal lebih dekat Pura Agung Arga Sunya mulai dari sejarah desa lokasi pura, situs yang ada, komposisi warga desa, sejarah pura, peristiwa longsor, hingga proses renovasi tebing pura yang menjadi momentum terciptanya kerja bakti cerminan kerukunan umat beragama di sana. Hal ini tidak semata dimaksudkan sebagai pelengkap data, melainkan juga sebagai paparan yang belum dapat dijumpai dalam pemberitaan media masa dan media sosial tentang Pura Arga Sunya terutama pada fenomena keruntuhan dan perbaikan pura (Wawancara dengan Asip H dan Samsul H, 14 November 2019).

Desa tempat Pura Agung Arga Sunya berada bernama Krisik, yaitu sebuah desa pertanian di kaki gunung di sisi utara timur Kabupaten Blitar. Dari topografinya, Desa Krisik umumnya berupa persawahan dan perbukitan pada ketinggian 656-818 meter di atas permukaan laut. Secara geografis Desa Krisik berbatasan dengan Desa Pagersari Ngantang Kab. Malang di sisi utara, Desa Tulungrejo Gandusari Kab. Blitar di sisi Barat dan Selatan, serta Desa Ngadirenggo Wlingi Kab. Blitar di sisi Timur. Adapun secara administratif, Desa Krisik masuk pada wilayah Kecamatan Gandusari Kabupaten dengan jarak tempuh ke kota kecamatan sejauh 12 km., sedangkan ke kota Kabupaten sejauh 39 km (Pemerintah-Desa-Krisik, 2016).

Sejarah keberadaan Desa Krisik barangkali akan memiliki beberapa versi jika ditelisik lebih jauh, terutama pada masa awal agama Islam yang datang ataupun sebelumnya. Akan tetapi, yang tercatat dan terdokumentasikan dalam benak warga adalah sebagaimana

umumnya sejarah desa-desa lain di Blitar yang dimulai pada masa perang Diponegoro (1825-1830). Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan, banyak pengikutnya yang menyebar ke arah Timur untuk kemudian membuka lahan dan kehidupan baru. Mereka menyamar sebagai penduduk biasa sambil menyebarkan agama dan membawa budaya sesuai karakter masing-masing. Adapun tokoh pengikut Pangeran Diponegoro yang membuka lahan di Krisik yang dulunya merupakan belantara yang dikenal angker dan tak berpenghuni bernama Mbah Sukoboyo. Pada akhirnya, Krisik yang angker menjadi layak dihuni dan dalam waktu cepat menjadi pemukiman ramai. Suatu kali, Mbah Sukoboyo teringat akan pusakanya berupa keris yang tertinggal saat melakukan ritual/tirakat di Petilasan Rambut Monte. Meskipun telah berselang beberapa tahun, Mbah Sukoboyo bersama warga dapat menemukan kembali kerisnya di petilasan tersebut dalam keadaan utuh. Dalam bahasa Jawa, terujar ungkapan “kerise isek” (kerisnya masih ada) saat menemukan keris tersebut, hingga lama kelamaan ujaran tersebut menjadi nama desa, *kerise isek* disingkat menjadi Krisik. Mbah Sukoboyo setelah itu ditunjuk oleh warga menjadi ketua/pemimpin desa hingga wafat. Adapun dimulai pada masa Belanda, ditunjuklah tokoh masyarakat menjadi Demang yang berlanjut menjadi lurah dan Kepala Desa hingga sekarang sudah mengalami pergantian ke 13. Saat ini Kepala Desa yang menjabat adalah Hari Budi Setyawan (Pemerintah-Desa-Krisik, 2016; Setyawan, 2012, FGD 17 November 2019).

Data administrasi Desa Krisik tahun 2010 menyebutkan jumlah penduduknya adalah 7.619 jiwa yang mana 50.48% nya adalah laki-laki. Pada tahun tersebut, penduduk usia produktif (20-49 tahun) sejumlah 46.59%. Tingkat kemiskinan warga Krisik saat itu dikategorikan tinggi yang ditunjukkan dengan jumlah KK pra

sejahtera dan KK golongan I sejumlah 53.89% (Pemerintah-Desa-Krisik, 2016).

Dalam laporan pemerintahan desa 2016, diketahui terdapat 4 masjid, 9 musalla, 1 pura, 6 sanggar (Hindu), dan 1 gereja (Kristen). Salah satu tokoh perwakilan pemerintah Desa Krisik dan ormas muslimat, Muji Dwi Astutik menyatakan bahwa pada tahun 2019, sudah terdapat penambahan tempat ibadah muslim menjadi 6 masjid dan 16

musalla, sehingga totalnya menjadi 22 tempat ibadah. Pura ada 7: Tirtomoyo 2, Krisik1, dusun Barurejo 4. Sedangkan gereja hanya 1 di Wonorejo. Astutik juga menambahkan bahwa saat ini, 2019, prosentase jumlah penduduk kurang lebih 70% muslim dan 30% non muslim (Pernyataan Muji Dwi Astutik, FGD, 17 November 2019). Adapun data jumlah pemeluk agama Desa Krisik dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1.

Jumlah penduduk menurut agama

NO.	AGAMA	LK	PR	JUMLAH	PERSEN
1	Islam	3359	3301	6659	87,41%
2	Kristen	27	33	60	0,79%
3	Katholik	3	4	7	0,09%
4	Hindu	457	433	890	11,68%
5	Budha	1	1	2	0,03%
JUMLAH		3847	3772	7619	

Sumber: *Pemerintah-Desa-Krisik, 2016*

Nama Desa Krisik dikenal bahkan jauh sebelum Pura Agung Arga Sunya dengan keberadaan situs Rambut Monte yang dulunya tempat bersemedi Mbah Sukoboyo selaku pembuka lahan. Tidak hanya kedekatan area dengan pura yang menyebabkan situs ini perlu disinggung di artikel ini, melainkan bahwa situs ini dimiliki oleh seluruh warga, tidak hanya didominasi oleh warga satu agama (wawancara dengan Khoirul Anam dan Hari Budi Setyawan, 17 November 2019). Mitos-mitos yang menyertai situs tua ini juga mewarnai kehidupan warga Desa Krisik.

Di area situs Rambut Monte Desa Krisik yang saat ini menjadi destinasi wisata dan cagar budaya, terdapat situs candi yang menyimpan mitos dan cerita tersendiri. Fitrahayunitisna

menuliskan setidaknya ada lima mitos yang turut menjaga ekologi situs ini; asal-usul namanya, air telaga, ikan dewa, pohon tua, dan penunggu. 1) Penamaan situs memiliki beragam cerita, yang populer dikaitkan dengan relief candi dekat telaga berbentuk manusia seperti *butha* (raksasa) berambut *monte* (gimbal). 2) Air telaga di situs ini dimitoskan memiliki tuah dan banyak kisah gaib, selain juga dianggap suci sehingga digunakan sebagai salah satu sarana penyucian umat Hindu. 3) Di dalam telaga terdapat banyak ikan sejenis hiu air tawar yang oleh masyarakat lokal disebut ikan Sengkaring yang dikeramatkan, diyakini berusiar tahun dan tidak pernah bertambah atau berkurang jumlahnya. 4) Pohon-pohon tua di kawasan situs dianggap bertuah, sehingga dilarang untuk dirusak atau ditebang. 5) Diyakini

di area situs ini terdapat banyak makhluk halus yang menunggui, sehingga para pengunjung diminta untuk menjaga sikap dan kesopanan (Fitrahayunitisna, 2019).

Tidak jauh dari situs Rambut Monte, berdiri Pura Agung Arga Sunya (gambar 1). Pura ini merupakan satu dari tujuh pura yang ada di Krisik (wawancara dengan Suwari dan Priyoko, 15 November 2019), menjadi salah satu dari dua pura Agung yang ada di dan satu dari 89 total pura yang ada di Blitar (PHDI-Jatim, 2010). Pada tahun 2000, tanah yang dibeli untuk dibangun pura ini masih berupa bukit tandus. Pada tahun 2001 pembangunan pura dimulai. Pada 2002 bertepatan kejadian bom

Bali, pembangunan dihentikan, hingga pada 26 Juli dilanjutkan pembangunannya dengan peresmian *ngadek linggih* (pemasangan pondasi dan bangunan dasar lainnya). Dimulai dari prosesi *ngadek linggih* hingga pensucian pura pertama saat itu memakan waktu hanya 108 hari, secara logika sulit diterima, namun terjadi. Kondisi lokasi perbukitan, pengerjaan dengan tenaga manual, dan terbatas, kurang lebih 120-an orang, ternyata bisa terwujud (Pernyataan Suwari dan Priyoko pada FGD 17 November 2019). Pada akhirnya pura ini diresmikan oleh Bupati Blitar pada Sabtu Kliwon, wuku Wayang, 11 Oktober 2003, sebagaimana yang tertulis di prasasti masuk pura.



Gambar 1. Pura Agung Arga Sunya: (Akhtar, 2019)

Praktik Kerukunan Umat Beragama di Sekitar Pura Arga Sunya

Pada bulan hujan, tepatnya November 2018, terjadi longsor pada tebing Pura Arga Sunya sisi Selatan. Hal ini menyebabkan pondasi sisi selatan runtuh dan lantai pura di sisi selatan pun terancam roboh. Akibat yang ditimbulkan longsor ini memaksa pihak pura untuk melakukan perbaikan segera. Pada bulan Juli, tepatnya tanggal 21, terekam oleh

media, berlangsungnya kerja bakti dari warga sekitar tanpa melihat gender dan agama (Hadi & Sucipto, 2019; Hartik, 2019; Hasani, 2019).

Saat kerja bakti perbaikan tebing pura, semua material diusung dari tangan ke tangan, orang-orang berbaris mengular, karena medan tidak memungkinkan menggunakan alat berat hingga ke atas, sehingga material dari jalan ke pura diusung manual. Pembangunan pondasi

tebing pada wilayah perbukitan tersebut bisa selesai pada bulan November 2019. Proses renovasi dihentikan sementara, menunggu musim hujan 2019 berlalu (wawancara dengan Suwari dan Priyoko, 11 November 2019; dan Khoirul Anam, 17 November 2019).

Renovasi perbaikan dinding pura yang berlangsung kurang lebih tiga hingga empat bulan tersebut membutuhkan berbagai dukungan material. Banyak sumbangan dari berbagai pihak yang sudah ditujukan kepada pihak pura, bahkan menurut Priyoko sumbangan dari umat (puniah) jauh lebih banyak. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal telah menyumbang 150 juta, BPPD Blitar menyumbang 1000 sak semen, dan Pemda Blitar menyumbang 40 juta. Sumbangan semen dari umat, dari komunitas motor, juga dari umat muslim terhitung setidaknya 100 sak. Belum lagi sumbangan umat dan warga berupa pasir, batu, maupun besi (Pernyataan Priyoko, FGD, 17 November 2019).

Pihak pura telah menyewa pekerja/tukang pembangunan, sehingga setiap hari pada masa renovasi tebing pura ada yang dikerjakan. Dukungan pihak luar tidak terbatas pada materi, tetapi juga tenaga yaitu dalam bentuk kerja bakti yang melibatkan berbagai warga dan pemeluk agama dilakukan pada hari libur tiap minggunya. Umumnya pada hari libur itulah warga dari luar baik dari warga sekitar, ataupun dari luar seperti komunitas tertentu, atau sekolah terdekat ikut berpartisipasi (Pernyataan Priyoko, FGD, 17 November 2019).

Rianto selaku perwakilan warga muslim menuturkan bahwa ia menyaksikan benar bahwa warga muslim terutama melalui koordinasi jamaah yasin beberapa kali ikut kerjabakti. Tidak hanya bapak-bapak, ibu-ibu muslim juga terlibat dalam kegiatan. Rianto mengaku bahwa keterlibatan warga muslim tersebut murni tanpa didahului undangan dari pihak

pura, melainkan sikap proaktif warga. Demikian pula yang terjadi sebaliknya, saat proses pengecoran masjid, teman-teman warga Hindu juga ikut. Pada saat warga muslim mengadakan pengajian, pihak Hindu juga mengirimkan pecalang untuk ikut mengamankan acara (Rianto, FGD, 17 November 2019).

Selain tenaga, dalam kerja bakti renovasi pura juga tak luput dari dukungan logistik. Priyoko menceritakan bahwa warga luar atau teman-teman muslim sekitar berkoordinasi dengan pihak pura dan mengatur jadwal kedatangan untuk ikut kerja bakti. Meskipun dapur pura menyiapkan suguhan, tak jarang para warga yang ikut kerja bakti turut membawa bekal atau bahan makanan untuk diolah dan dikonsumsi bersama (Pernyataan Priyoko, FGD, 17 November 2019).

Suwari menambahkan bahwa tidak hanya dalam proses renovasi saja pura ini melibatkan peran warga muslim, bahkan dalam kerja bakti sebelumnya. Dalam menggambarkan bentuk harmoni warga ia menyatakan:

“Secara logika pembangunan pura dan renovasi dengan kondisi semacam ini tidak mungkin. Tenaga juga manual. Tetapi, astungkara, dengan kerjasama 120an orang tidak peduli agama apa bisa melakukan kerja bakti. Tiap warga yang punya makanan, ketela dibawa, jagung dibawa, semua bekerja sama, bawaan di masak di sini.” (Suwari, FGD, 17 November 2019).

Perwakilan WHDI menambahkan bahwa ibu-ibu muslim ikut membantu dan berbaur juga di dapur pura, memasak makanan dan camilan bersama. Demikian pula saat prosesi piodalan, umat agama lain ikut menyumbang makanan dari rumah untuk disumbangkan saat acara. Sebaliknya, saat umat muslim mempunyai acara, pihak WHDI juga proaktif dan

meminta kabar (Pernyataan Rika dan Indarsih, FGD, 17 November 2019).

Praktik silaturahmi masyarakat Desa Krisik tidak hanya terjadi karena peristiwa longornya tebing pura, melainkan sudah berlangsung harmonis sejak lama hingga masyarakat Desa yang dijumpai sekarang tidak mengetahui dengan pasti kapan mulanya. Beberapa warga dan perwakilan pemerintah desa menuturkan bahwa dalam ingatan yang ada, belum pernah ada bentrokan (bermotif agama) yang terjadi antara warga Muslim dan Hindu Krisik dan bahwa kultur Desa Krisik memang rukun. Demikian pula yang terlihat dalam persebaran pemukiman di desa

ini, muslim dan Hindu saling berbaur (Wawancara dengan Khoirul Anam, dan Pernyataan peserta FGD, 17 November 2019).

Pembauran warga juga sangat tampak dalam momentum bersama, baik yang dibuat, fenomena tahunan, maupun yang insidental. Momentum yang dibuat seperti saat bersih desa, kerja bakti membangun rumah, dan juga tempat ibadah. Fenomena tahunan tampak pada saat hari raya dan hari besar. Momentum insidental terjadi seperti saat menemui fenomena siklus hidup warga (kelahiran, pernikahan, kematian), termasuk di dalamnya saat terjadi bencana.



Tampak barisan orang mengangkut material dari bawah ke atas



Kerja bakti pembangunan tebing pura tampak dari atas

Gambar 2. Dokumentasi Kerjabakti renovasi tebing pura: Dokumentasi Jakarta Pos (Hasani, 2019)

Hal yang menarik jika diamati lebih lanjut adalah metode pendekatan Hindu minoritas dan penerimaan muslim mayoritas. Umat Hindu sebagai minoritas selalu berusaha menyesuaikan diri dan berbaur sealamiah mungkin dengan warga Muslim mayoritas. Sementara Muslim mayoritas merangkul umat Hindu sebagai saudara dan sesama warga. Mereka melakukan hal ini karena lebih mencari rasa aman dan nyaman, jika kondisi nyaman, maka imbasnya dapat beribadah dengan nyaman pula (Pernyataan Muji Dwi Astutik, FGD, 17 November 2019).

Faktor-Faktor Pendorong KUB di Desa Krisik dan Potensi Penghambatnya

Keberhasilan terciptanya kerukunan umat beragama yang mawujud di Krisik setidaknya didorong empat faktor: geografis, kesejarahan, budaya lokal, serta sistem pemerintahan yang mendukung. Secara geografis, Krisik adalah pedesaan di perbukitan, lebih dekat dengan daerah kaki gunung Kawi Malang. Meskipun media masa, televisi, dan juga jaringan internet sudah masuk, tetapi suasana sederhana pedesaan yang masih belum banyak terpapar pengaruh luar masih sangat terasa. Mobilisasi warga ke luar

daerah seperti memasok barang dagangan juga masih terbatas. Pendidikan anak keluar daerah biasanya dimulai pada usia sekolah menengah dan perguruan tinggi (wawancara dengan Khoirul Anam, dan pernyataan peserta FGD, 17 November 2019). Perkembangan berikutnya, yang menyebabkan masuknya orang luar ke Krisik adalah dijadikannya situs Rambut Monte dan Pura Agung Arga Sunya sebagai tempat wisata dengan batasan sebagai wisata religi. Kuatnya prinsip warga dalam menjaga tradisi kerukunan serta mitos wingitnya situs Rambut Monte dapat menjadikan benteng pengaruh bagi mereka. Pada pedesaan dengan letak geografis yang berbeda, terutama yang lebih berdekatan dengan akses pusat kota misalnya, penjagaan tradisi dan kepercayaan pada mitos tidak lagi kuat.

Dari faktor sejarah, umat Hindu di Krisik diasumsikan sudah lama ada atau

pernah ada jauh sebelum desa terbentuk, didukung keberadaan candi kuno Rambut Monte. Babad desa yang diyakini saat ini memang diawali pada masa Islam oleh pengikut Pangeran Diponegoro, tetapi bukti keberadaan candi tersebut membuktikan sudah pernah ada keberadaan masyarakat pembentuknya sekecil apapun, dan masyarakat tersebut adalah masyarakat Hindu. Bagi umat Hindu Krisik saat ini, keberadaan situs candi ini dapat dijadikan penguat kepercayaan diri mereka untuk memeluk agama Hindu di wilayah ini. Adapun bagi umat non Hindu, candi Rambut Monte ini juga dapat dijadikan pengingat bahwa masyarakat pendahulu yang mendiami Krisik adalah warga Hindu, sehingga mereka perlu menjaga sikap untuk dapat menghormati umat Hindu (wawancara dengan Suwari, Hari Budi S, dan Wakidi, 11 dan 16 November 2019).



Terlihat Tetua Desa memimpin ritual



Candi Rambut Monte Desa Krisik

Gambar 3. Suasana Bersih Desa Krisik di Situs Rambut Monte: (Setyawan, 2012)

Pendukung kerukunan selanjutnya menurut peneliti adalah terjaganya budaya lokal dan kedewasaan orang Jawa. Budaya setempat yang memiliki potensi kearifan lokal sebagai orang Jawa masih diwariskan dan dijalankan, seperti konsep *tepo seliro*, *gupuh suguh*, *sanak*, dan lain sebagainya. *Tepo seliro* merupakan konsep toleransi yang dikenal luas dalam khasanah Jawa. *Gupuh suguh* dapat dimaknai sebagai sikap saling menjamu, memberikan suguhan. Jika orang Jawa

mendapat tamu, maka sudah menjadi adat bahwa tuan rumah merepotkan diri untuk bisa memberikan suguhan terbaik meskipun seadanya, dan bisa jadi malah dipaksakan ada. Makanan diyakini sebagai sarana penguat persaudaraan sehingga budaya saling memberi makanan juga menjadi pengerat persaudaraan pula. Dalam masyarakat Jawa misalnya dikenal semboyan *pager mangkok luwih kuat tinimbang pager tembok*, pagar persaudaraan yang dicipta

dengan saling memberikan makanan (dalam mangkok) lebih kuat dibanding membangun pagar tembok. Implikasi hal ini, setiap tamu yang berkunjung ke Pura juga akan dijamu mereka, sebagaimana saat umat Hindu juga bertamu ke umat lainnya. *Sanak* dimaknai sebagai saudara. Saudara tidak hanya merupakan saudara sekandung, tetapi juga tetangga, sahabat,

atau bahkan tamu/orang lain yang dianggap dan dijadikan saudara. Prinsip memperbanyak saudara sudah sangat lazim bagi orang Jawa. Orang Jawa lebih memilih mendapat saudara meskipun dengannya diikuti dengan kerugian harta. Orang Jawa punya semboyan *bathi sanak rugi sathak*, lebih baik rugi harta benda asal bisa mendapat saudara baru (hasil FGD, 17 November 2019).



Para pemerintah desa, warga pura, dan warga muslimat NU Krisik saat kerja bakti renovasi pura



Tampak ibu-ibu Muslim dan Hindu menyiapkan *dawet* (makanan ringan)

Gambar 4. Contoh kedekatan hubungan umat Muslim dan Hindu di Krisik saat kerjabakti: (Dokumentasi peneliti sumbangan warga Muslimat NU Krisik)

Konsep kerukunan menurut peneliti juga tercipta tidak lepas dari adanya peran aktor atau tokoh. Tokoh agama baik Hindu, Muslim, ataupun Kristen di Krisik memberikan sumbangan peran masing-masing untuk membimbing umatnya memegang nilai kerukunan. Selain tokoh agama, terdapat pula peran para pengelola pemerintahan yang mendukung terciptanya kerukunan warganya. Pemerintahan yang tidak memihak dan membedakan warga menjadi faktor penting pula mewujudkan kerukunan dan keamanan warganya. Tokoh agama dan pemerintah desa juga menjadi jembatan penyambung warga dengan tokoh lebih tinggi dan pemerintah lebih tinggi secara struktur (hasil FGD, 17 November 2019). Suasana harmoni dan kearifan lokal tidak mungkin ada dengan

sendirinya tanpa adanya tokoh dan agen yang melakukan promosi dan provokasi. Nilai-nilai yang mengandung banyak kebijakan ditularkan dan diajarkan melalui praktik, termasuk dalam kegiatan tradisi desa maupun tradisi gotong royong yang ada.

Usaha menjaga kerukunan umat beragama serta tradisi lokal di Desa Krisik tentu tidak lepas dari adanya penghambat yang menyertai. Akan tetapi, penggalian terhadap data penghambat ini memang tidak menjadi fokus utama dalam kajian. Beberapa contoh informasi yang ikut tertangkap peneliti misalnya adanya beberapa warga yang kurang setuju dengan pelaksanaan tradisi bersih desa di situs Rambut Monte yang dianggap dekat dengan praktik syirik dan bidah

(wawancara dengan Wakidi, Khoirul Anam, dan Hari Budi S, 15-17 November 2019). Khoirul Anam menyatakan pula bahwa hubungan warga Muslim dengan Hindu di Krisik tetaplah harmonis, belum ditemukan bentrokan di antara dua belah pihak.

“Tidak ada bentrokan antara Muslim-Hindu selama ini. Yang menjadi kekhawatiran malah beberapa alumni salafi yang juga warga sini setelah pulang dari kuliah mengajak dan membawa paham yang kurang bisa diterima warga muslim sendiri. Karena mereka aktif, mereka sekarang bisa masuk menjadi takmir masjid. Ini yang memprihatinkan” (Khoirul Anam, 15/11/17).

Beberapa konflik kecil atau laten yang cukup dengan dikubur lalu hilang bagi pihak umat Hindu misalnya peneliti tangkap dari paparan Suwari dan Priyoko. Suwari menceritakan -dengan nada bercanda- bahwa adat di pura adalah menjamu tiap tamu yang datang berkunjung dengan hidangan yang disediakan pihak dapur, tanpa melihat latar belakang dan agama tamu. Di saat demikian, banyak tamu Muslim yang masih merasa enggan dan khawatir dengan tawaran makan minum pihak pura. Suwari menyatakan bahwa di Krisik Blitar ini, makanan kami umat Hindu tidaklah berbeda dengan yang dikonsumsi saudara Muslim, tidak ada makanan haram yang disuguhkan kepada tamu. Pasar tempat belanja umat Hindu Krisik pun sama dengan lainnya, bahkan untuk makanan daging dan ikan, pihak Hindu lebih memilih membeli dari penjual Muslim. Di sisi lain, dalam adat Jawa menolak suguhan merupakan perilaku yang kurang sopan dan jika diungkap serius tentu menimbulkan konflik besar (wawancara dengan Suwari, 15 November 2019).

Potensi konflik yang dianggap kecil oleh pihak Hindu dan Pura misalnya permasalahan keterbukaan pura terhadap pengunjung, karena pura telah menjadi milik seluruh umat dan masyarakat. Seringkali, pengunjung tidak membedakan sikap antara mengunjungi pura sebagai tempat wisata religi dengan tempat wisata pada umumnya. Dari sini maka ditemukan banyak sikap pengunjung yang terkesan abai atau tidak memahami cara bersikap di pura yang meskipun dibuka sebagai tempat wisata, tetapi tetaplah merupakan tempat ibadah umat Hindu. Priyoko menyatakan bahwa memang Pura di sini tidak dapat diperlakukan sebagaimana mestinya seperti di Bali yang mayoritasnya adalah umat Hindu. Jika di Bali penghormatan terhadap Pura sudah terbentuk dengan sendirinya dalam sistem, sehingga para pengunjung pun berlaku dewasa pula saat berkunjung dengan mengikuti aturan dan adat yang diminta, maka berbeda dengan pengunjung pura di sini. Pranata pura di sini belumlah sekuat pranata pura di Bali. Sebagai contoh misalnya jika melakukan pencarian foto pura Arga Sunya atau situs Rambut Monte pada media sosial, akan ditemukan banyak unggahan foto para pengunjung yang bagi umat Hindu dianggap kurang sopan (wawancara dengan Priyoko, 15 November 2019).

Bagian pura dapat dibagi menjadi tiga bagian yang dikenal dengan konsep Tri Mandala. Mandala paling bawah (nista mandala) digunakan untuk semua suasana, termasuk dapur. Pada bagian ini pengunjung masih dapat melakukan hal-hal di luar ibadah dan acara resmi, adab bersikap di bagian ini masih sangat longgar. Bagian kedua (madya mandala) dapat digunakan sebagai tempat kegiatan sosial dan acara resmi. Sedangkan bagian mandala paling atas hanya untuk acara keagamaan, yaitu tempat memuja dan tempat sembahyang. Keinginan pihak pura sebenarnya adalah membuka pura untuk para wisatawan hanya pada

sampai tingkat nista mandala, dan maksimal pada lantai madya mandala. Keterbukaan pura adalah terbuka untuk beribadah. Meskipun demikian, pihak pura belum mampu memberikan himbauan dan larangan yang tegas terhadap para pengunjung/wisatawan yang melanggar tanpa sepengetahuan pengelola pura (wawancara dengan Priyoko, 15 November 2019).

Program pembangunan pura tidak hanya terhenti pada bangunan utama pura yang sudah ada saat ini. Konsep Pura di Bali memiliki tanah *pelapur*, yang dalam konteks daerah sini bisa disebut tanah wakaf, sebagai aset. Pura juga disarankan mampu mengelola ekonomi dan rumah tangga sendiri, sehingga banyak pura yang juga memiliki minimarket. Oleh karenanya, tidak aneh jika pihak pura Argasurya juga bercita-cita dapat mengembangkan pembangunan pura meluas yang tidak hanya memenuhi kebutuhan peribadatan. Hanya saja, fokus pembangunan dan dana yang tersedia saat ini belum memungkinkan untuk melakukan pengembangan lebih jauh. Sementara ini, tanah yang menjadi wilayah pura hanyalah yang ditempati bangunan dan akses jalan di depan pura. Ke depan, tentu pihak pura berkeinginan untuk dapat membeli lahan yang ada di depan atau di samping pura. Hanya saja, tanah sekitar tersebut masih milik warga muslim, yang belum tentu nantinya mudah untuk dibeli (wawancara dengan Suwari dan Priyoko, 15 November 2019).

Beberapa permasalahan yang belum sampai muncul di permukaan tersebut kiranya tetaplulah ada. Sangat mungkin harmoni yang tercipta belumlah harmoni hakiki, tetapi baru harmoni semu. Sikap dan waktulah yang akan menentukan potensi konflik yang ada menjadi besar atau cukup sebagai konflik kecil yang mudah dikubur dan hilang. Bagaimanapun juga, bukankah kontestasi dakwah antar agama selalu

mengandung potensi konflik. Hubungan sosial memang tidak memandang suku dan agama, tetapi hubungan yang menyangkut peribadatan dan dakwah bisa sangat rentan rapuh.

Merumuskan Model KUB dari Desa Krisik

Kajian ini selanjutnya dapat memberikan rumusan baru model kerukunan dan faktor pendukungnya yang terlihat di Desa Krisik untuk dapat diadopsi dan dibangun kembali di tempat lain. Setidaknya ada empat hal yang dapat diamati dan dirumuskan terkait penciptaan KUB: konstruksi kesadaran geografis dan sejarah desa, penguatan dan penerapan prinsip kerukunan berbasis ajaran agama dan kearifan lokal, partisipasi dan pembagian peran menjaga kerukunan, serta menciptakan dan memaknai momentum kerukunan.

Konstruksi geografis yang dimaksud adalah membangun kesadaran lokasi daerah suatu masyarakat. Jika kondisi yang ada berupa daerah pedesaan, maka memaksimalkan potensi yang ada dan menyadari perannya akan lebih baik dilaksanakan dibandingkan terlalu mengubah diri untuk mengikuti daerah lain yang berbeda karakteristik. Setelah kesadaran akan daerah berikut potensinya terbangun, maka upaya berikutnya adalah melakukan eksposisi potensi geografis. Eksposisi ini dilakukan dengan menonjolkan kekhasan daerah yang dimiliki untuk kemudian diadu atau "dijual" ke luar.

Demikian pula penggalian kembali faktor sejarah, penulisan ulang secara ilmiah asal muasal daerah/desa, serta penyebaran informasi yang memadai akan memunculkan sikap kepercayaan diri warganya selain juga menjadikan warga sadar diri untuk kembali membina kerukunan sesama warga sebagai saudara. Pembangunan mental bangsa sangat

dimungkinkan dari penggalian sejarah dan menghidupkan tradisi lisan daerah (Duija, 2005; Vansina, 2014). Kedua hal ini berkelindan dan sangat bernilai penting. Dalam konteks masyarakat Desa Krisik ini misalnya, sejarah yang tercatat baru dimulai pada era Pangeran Diponegoro atau abad 19, sedangkan bukti sejarah yang dimiliki sebagai penentu keberadaan desa sebelumnya sudah ada berupa Candi Rambut Monte. Sejarah keberadaan candi ini belum tertulis secara ilmiah, oleh karenanya penulisan sejarah Desa Krisik yang lebih tua bisa saja didasarkan pada sumber lisan yang kemudian dituliskan dan dipublikasikan.

Selain penerapan prinsip kedewasaan masyarakat Jawa terutama melalui kearifan lokal yang dimiliki, penguatan, dan pengamalan nilai kerukunan berbasis ajaran agama juga dapat dilaksanakan, yaitu misalnya kembali pada konsep *Tri Hita Karana* umat Hindu dan konsep *tasamuh* umat Muslim. Nilai kearifan lokal masyarakat terbukti telah menghapus sekat perbedaan agama dan mengedepankan prinsip persaudaraan. Adapun nilai kerukunan berbasis ajaran agama, tentu sudah dimiliki dan perlu dikuatkan. Jauh sebelum konsep moderasi beragama digaungkan oleh Kementerian Agama, nilai-nilai moderat dan toleransi sudah diajarkan dan dijalankan oleh masyarakat Indonesia. Semua agama yang dianut masyarakat Indonesia mengajarkan prinsip-prinsip hal ini. Agama Islam misalnya, mengajarkan konsep *rahmatan lil alamin* (kasih sayang bagi seluruh alam) (Hannas & Rinawaty, 2018; Mohamed & Ofteringer, 2015; Nata, 2016; Zuhdi, 2011) dan *tawassuth-tawazun* (berada di tengah dan seimbang) (Muzakky, 2016; Prasetiawati, 2017). Hal-hal ini didukung dengan dalil Alquran dan Hadis yang juga diturunkan melalui contoh-contoh teladan yang sangat berlimpah. Sementara dalam Hindu dapat ditemui ajaran Tri Hita Karana (Sukarma, 2016) yang

mengatur hubungan Tuhan, manusia, dan alam semesta. Kerangka agama Hindu terdiri dari *tatwa*, *susila*, dan *upacara* yang masing-masing saling mendukung dan menyatu. Selain itu, terdapat pula seloka-seloka yang mengajarkan kedewasaan seperti *wasudewa kutumbakam* (kita semua adalah saudara).

Terkait ajaran Tri Hita Karana dan Kerangka agama Hindu, Pengelola Pura memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Kita hakikatnya adalah satu. Dimana dalam tri hita karena: 1) manusia-tuhan, harus baik; 2) hubungan manusia-manusia, tidak hanya intern umat beragama, semua diakui sebagai saudara. Kita pada dasarnya satu sumber, satu atman, dari tuhan YME. Maka dalam setiap kegiatan apapun, karena kita merasa satu sumber dari tuhan, maka tidak ada sekat bagi kami, tidak ada orang lain, melainkan saudara. Berdasarkan ajaran Tatwam Asi (aku adalah engkau, engkau adalah aku), atman yang ada di diri kita sama dengan yang di tubuh semua manusia, bahkan semua tubuh yang ada di alam semesta; 3) manusia-alam semesta, maka kami umat Hindu selalu menghargai dan menjaga keseimbangan alam semesta, manusia, tumbuhan, dan makhluk yang nilai tatarannya ada di bawah manusia, kita yakini dijaga keseimbangannya” (Keterangan Suwari dan Priyoko, FGD 17 November 2019).

“Kerangka agama adalah: *tatwa*, *susila*, dan *upacara*. *Tatwa* adalah teologi, sumber ajaran paling pokok. Ajaran etika *susila* adalah tiga sumber yang harus disucikan pikiran, ucapan, dan perilaku. Ketiga adalah upacara, ritual dan sebagainya. Jika diibaratkan telur, cangkang adalah upacara, *susila* di

putih telur, tatwa di kuning telurnya. Dari ajaran itu, implementasinya dikembangkan dalam ucapan, perilaku, sikap, gotong royong, dan seterusnya” (Keterangan Suwari dan Priyoko, FGD 17 November 2019).

Jika model perumus kerukunan umat beragama sebelumnya cenderung normatif, maka model keempat ini lebih bersifat pengembangan eksploratif, yaitu berdasar analisis di lapangan. Terwujudnya kerukunan umat beragama di Desa Krisik tidak lepas dari partisipasi berbagai pihak serta pembagian peran mereka yang saling berkontestasi dalam mewujudkan kerukunan. Para tokoh agama melaksanakan perannya membina umat dan mengajarkan toleransi. Pejabat pemerintah melaksanakan tugasnya mengayomi warga dan tidak membedakan satu sama lain. Lembaga ormas masyarakat dan keagamaan turut mendukung terciptanya kerukunan. Koordinasi masing-masing pihak juga terus dilaksanakan secara aktif berkesinambungan. Salah satu contoh yang menggambarkan sikap saling menjaga keamanan dan kerukunan misalnya, para pemuda Ansor dan Banser turut menjaga dan membawa ogoh-ogoh saat pawai menjelang Nyepi umat Hindu. Sebaliknya, pada saat pelaksanaan Salat Id, para pecalang Hindu turut memberikan pengamanan dan penjagaan ketertiban (Informasi dari tokoh Hindu dan Muslim, FGD 17 November 2019).

Selain hal itu, publikasi kegiatan untuk masa sekarang ini juga sangat penting, dan tiap tokoh/agen baik dari pihak Hindu dan Muslim di Krisik melakukan hal itu. Sebagai contoh, pihak Pura juga memiliki akun sosial media yang dengannya dapat memberikan publikasi kegiatan dan penyebaran ajaran kedamaian. Publikasi kegiatan dan penyemaian ajaran damai ini dapat pula dimaknai sebagai sikap mengubur konflik yang sangat mungkin

ada agar tidak tampak ke permukaan. Penyemaian ajaran dan publikasi tentu menuntut adanya agen dan aktor yang melakukannya secara intensif.

Contoh kutipan status dari akun Facebook Pura Arga Sunya pada momentum kerja bakti pembangunan pura sebagai berikut.

krj bhakti umat hindu dr bintang ngaringan, d lanjutkan keesokan harinya oleh warga muslim dukuh rambut monte krisik & siswa siswi SMK Doko. bersamaan jg kgiatan Unit Kerohanian Mahasiswa Hindu Dharma(UKMHD) Universitas Erlangga, Surabaya. Puja Astungkara Karunia Hyang Widhi senntiasa mengalir memperlncar proses pembngunan tebing pura yg longsor melalui kepedulian umatMU dari sgla pnjuru dan keyakinan. Astungkara (Pura-Agung-Arga-Sunya, 2019)

Momentum yang menjadikan perekat kerukunan umat beragama di Desa Krisik selain pada saat insidental seperti menghadiri acara siklus hidup warga maupun bencana adalah momentum yang diciptakan. Momentum yang diciptakan ini bermacam bentuknya, terus digalakkan dan dibiasakan. Seperti misalnya saat kerja bakti, acara bersih desa, atau membangun rumah dan tempat ibadah. Pada saat kerja bakti yang ada adalah istilah warga, tidak lagi memandang umat apa. Pada saat bersih desa, semua warga juga berpartisipasi aktif, menyatu, bahkan ditambah dari para pendatang. Pada saat membangun rumah yang umumnya masih dikerjakan bersama-sama dari awal, ataupun secara simbolis saat menaikkan atap, kebersamaan tercipta saat tetangga berdatangan membantu lalu makan bersama. Demikian pula saat pembangunan tempat ibadah, baik dari membangun pura ataupun membangun masjid, masing-masing pihak (umat) akan datang membantu tanpa diundang tersendiri.



Tampak warga Krisik membangun masjid di desa



Barisan warga menyalurkan material cor masjid

Gambar 5. Kerjabakti lintas agama membangun masjid: (Pura-Agung-Arga-Sunya, 2019)

Momentum perekat kerukunan di desa ini memang terus diupayakan dalam berbagai kesempatan, utamanya juga untuk menekan konflik. Hal ini juga sudah tergambar dan terwakili sebelumnya dalam laporan pemerintahan desa. Seperti tampak dalam kutipan berikut:

“Desa Krisik mempunyai dinamika politik lokal yang bagus, jika dilihat dari segi pola dan pemilihan kepemimpinan yang demokratis. Meskipun demikian, masyarakat Krisik kurang antusias dengan politik daerah dan nasional karena tidak terkait langsung. Masyarakat Krisik masih kental sebagai masyarakat yang melestarikan budaya seperti pemakaian kalender/perhitungan Jawa, rangkaian tradisi, dan akulturasi lain sebagainya. Arus informasi dan budaya luar memang mulai masuk, dan menjadi tantangan bersama dalam merespon tradisi hingga memunculkan kelembagaan politik, agama, budaya, dan lain sebagainya. Hal ini perlu kearifan sikap, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik, tetapi secara sosiologis ia akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial” (Pemerintah-Desa-Krisik, 2016).

SIMPULAN

Kerukunan umat beragama yang tampak di permukaan terlihat harmonis memang bisa jadi menyimpan konflik laten, dan masyarakat beragama di Krisik juga menyadari hal itu. Meskipun demikian, masyarakat di sana sudah membiasakan silaturahmi dan memperkuat jalinan persaudaraan dan sosial. Hal ini sangat tampak dalam momentum kegiatan sosial baik yang insidental maupun yang diciptakan. Di samping itu, upaya pembauran umat Hindu yang minoritas terus dijalankan dan disambut oleh Muslim mayoritas. Terlepas dari asumsi harmoni umat beragama yang masih semu ataupun hakiki di Desa Krisik, tetapi dalam fakta yang tampak, kerukunan di sana dapat dilihat, dan itu sudah cukup jika hanya untuk memenuhi tuntutan sebagai warga negara Indonesia yang merupakan makhluk sosial beragama.

Nilai kearifan lokal yang menjadi modal sosial dimiliki pula oleh masyarakat Krisik. Nilai-nilai ini tentu akan berbeda tiap daerah dan menyesuaikan situasi dan kondisi. Dalam satu sisi, kondisi geografis Krisik yang merupakan pedesaan masih memungkinkan menjaga kearifan lokal dengan baik karena pengaruh dari luar masih belum gencar. Selain dijaga, kearifan lokal Jawa seperti *tepo seliro* juga masih dijalankan dan tampak dalam kehidupan mereka.

Penjagaan nilai toleransi masyarakat Krisik juga terdukung dari kesadaran sejarah keberadaan masyarakat Hindu yang jauh sebelumnya pernah ada di sana. Tugas selanjutnya adalah menjaga dan memperbarui berkesinambungan nilai-nilai luhur yang masih ada untuk terus ditularkan dari generasi ke generasi.

Keberadaan masyarakat Krisik yang masih bertahan dengan melestarikan tradisi baik itu berupa filosofi Jawa ataupun sisa-sisa ajaran Hindu tidak bisa dilepaskan dari peranan tokoh-tokoh yang memiliki akses struktural dan kultural seperti para aparat pemerintah desa, tokoh agama Hindu dan Muslim, dan lembaga ormas. Tokoh-tokoh inilah yang kemudian yang merawat kerukunan tersebut dalam praktik-praktik baik secara kultural maupun struktural. Praktik kultural berupa kerja bakti, bersih desa, dan lain sebagainya yang menjaga kerukunan, sementara praktik struktural berupa peranan yang memastikan bahwa masyarakat terjaga kerukunannya melalui akses kekuasaan yang dimiliki oleh para aktor. Keberadaan aktor ini penting karena masyarakat membutuhkan pemacu dan penggerak.

Pada akhirnya, kerukunan umat beragama memang menyimpan potensi konflik laten di dalamnya, tetapi konflik laten ini bisa ditekan untuk menjaga kerukunan. Kajian ini menunjukkan bahwa bahkan usaha menjaga kerukunan pun bisa diinisiasi oleh pihak minoritas Hindu di tengah mayoritas Muslim. Konsep kontestasi faktor pendukung terciptanya KUB yang dimanfaatkan dalam kajian ini memungkinkan untuk menguatkan KUB. Selain itu praktik KUB yang ada dan faktor pembentuknya dapat diadopsi untuk menciptakan KUB di lokasi yang berbeda dengan

pengembangan yang tentu saja tidak harus selalu sama bentuknya.

Kajian ini terbatas pada kajian dengan persepsi tradisi lisan dan etnografi baru yang bisa jadi masih memunculkan kedangkalan penggalian data. Disarankan adanya studi lanjutan yang berkesinambungan pada tema penguat KUB berbasis tradisi dan kearifan lokal dengan metode yang lebih detil, waktu lebih panjang, dan juga perbandingan di lokasi yang berbeda.

REKOMENDASI

Kajian ini setidaknya dapat mendorong dua rekomendasi. 1) Kementerian Agama beserta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu meningkatkan dan mengakomodasi penggalian data, pemertahanan, juga praktik tradisi lisan dan kearifan lokal sebagai penguat kerukunan umat beragama. 2) Aparat pemerintah, lembaga ormas, dan tokoh perlu menjaga sinergi dan memaksimalkan peran untuk memastikan penciptaan kerukunan umat beragama.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang membantu dan berpartisipasi dalam terlaksana dan tersajinya hasil penelitian ini, utamanya kepada Pengelola Pura Agung Arga Sunya dan masyarakat Desa Krisik. Penulis juga menyampaikan banyak terimakasih kepada redaktur dan mitra bestari yang berkenan membaca dan memberikan koreksi yang sangat membangun.

DAFTAR ACUAN

- Akhtar, I. (2019). *Eksotisme Blitar Timur*. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=TKVhZkwXRf4&t=13s>
- Armini, G. A. (2017). Toleransi Masyarakat Multi Etnis dan Multi Agama dalam Organisasi Subak di Bali. *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 5(1). <https://doi.org/10.30959/patanjala.v5i1.152>
- Aslati, A. (2012). Toleransi Antar Umat Beragama dalam Perspektif Islam (Suatu Tinjauan Historis). *Toleransi*, 4(1), 52–58. <https://doi.org/10.24014/trs.v4i1.1032>
- Bakar, A. (2015). Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama. *Toleransi*, 7(2), 123–131. <https://doi.org/10.24014/trs.v7i2.1426>
- Basyari, I. W. (2014). Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Lokal Wisdom) Tradisi Memitu pada Masyarakat Cirebon (Studi Masyarakat Desa Setupatok Kecamatan Mundu) H. *Edunomic*, 2(1).
- Duija, I. N. (2005). Tradisi lisan, naskah, dan sejarah Sebuah catatan politik kebudayaan. *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia*, Vol. 7, p. 115. <https://doi.org/10.17510/wjhi.v7i2.296>
- Fitrahayunitisna. (2019). Kesadaran Ekologis dalam Mitos di Telaga Rambut Monte Desa Krisik Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. *Jurnal Studi Budaya Nusantara*, 3(1), 40–51.
- Gatra. (2019). Sepanjang 2019 Imparsial sebut 31 kasus intoleransi di Indonesia. Retrieved November 10, 2019, from News website: <https://www.gatra.com/detail/news/457157/politik/sepanjang-2019-imparsial-sebut-31-kasus-intoleransi-di-indonesia>
- Ghazali, A. M. (2016). Toleransi Beragama dan Kerukunan dalam Perspektif Islam. *Religious: Jurnal Agama Dan Lintas Budaya*, 1(1), 25–40.
- Hadi, S., & Sucipto, A. (2019, July 21). Belajar Rukun dari Desa Krisik: Saat Umat Islam, Hindu & Kristen Bersatu Memperbaiki Tebing Pura. *Tribunnews.Com*. Retrieved from <https://bali.tribunnews.com/2019/07/21/belajar-rukun-dari-desa-krisik-saat-umat-islam-hindu-kristen-bersatu-memperbaiki-tebing-pura>
- Hannas, & Rinawaty. (2018). Islam Rahmatan Lil 'Alamin. *Journal Kerugma*, 1(1), 1–18. <https://doi.org/10.33856/kerugma.v1i1.50>
- Hartik, A. (2019, July 26). Saat Perbedaan Keyakinan Tak Halangi Warga Blitar Bantu Bangun Pura yang Longsor... *Kompas.Com*. Retrieved from <https://malang.kompas.com/read/2019/07/26/16030541/saat-perbedaan-keyakinan-tak-halangi-warga-blitar-bantu-bangun-pura-yang>
- Hasani, A. (2019, July 23). In Muslim-majority villagers maintain interfaith harmony brick by brick. *TheJakartaPost*. Retrieved from <https://www.thejakartapost.com/news/2019/07/23/in-muslim-majority-blitar-villagers-maintain-interfaith-harmony-brick-by-brick.html>
- Kemenag-R.I. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Khatib, A. (2016). KONTESTASI LANGGAR DAN PESANTREN (Studi Atas Pranata Keagamaan Lokal di Sumenep Madura) THE CONTESTATION BETWEEN

- LANGGAR AND PESANTREN (A Study on Local Religious Institution in Sumenep Madura). *Anil Islam*, 9(1), 32–54.
- Lestari, S., Surakarta, U. M., Faturachman, F., Mada, U. G., Adiyanti, M., & Mada, U. G. (2013). The Concept of Harmony in Javanese Society. *Anima, Indonesian Psychological Journal*, 29(June 2016), 24–37.
- Maryani, E., & Yani, A. (2018). Local wisdom of kampung naga in mitigating disaster and its potencies for tourism education. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research: 1st International Conference of Innovation in Education (ICoIE 2018) Local*, 178.
- Mohamed, A. S., & Ofteringer, R. (2015). Rahmatan lil-'alamin (A mercy to all creation): Islamic voices in the debate on humanitarian principles. *International Review of the Red Cross*. <https://doi.org/10.1017/S1816383115000697>
- Muslim, A. S., & Mujab, S. (2019). Kearifan Lokal dan Peran Elit Agama dalam Merawat Toleransi Antar Umat Beragama di Akar Rumput. *EMPIRISMA*, 28(1). <https://doi.org/10.30762/empirisma.v28i1.1493>
- Muzakky, A. F. (2016). Implementasi At-Tawassuth Ahlus Sunnah Wal Jama'ah Sebagai Nilai Pendidikan Karakter Di Mi Khozainul Ulum Bojoasri Kali Tengah Lamongan. *AKADEMIKA*, 10(1). <https://doi.org/10.30736/akademika.v10i1.52>
- Nata, A. (2016). Islam Rahmatan Lil Alamin Sebagai Model Pendidikan Islam Memasuki Asean Community. In *Makalah*.
- Nisa', A. K., & Tualeka, M. W. N. (2017). Kajian Kritis Tentang Toleransi Beragama dalam Islam. *Al-Hikmah*, 2(2).
- Parasmita, I. K. T. (2017). Toleransi Umat Beragama antara Hindu dan Islam di Kelurahan Lelateng Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 1(2), 248–251.
- Pemerintah-Desa-Krisik. (2016). *Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Krisik Tahun Anggaran 2016*. Retrieved from https://www.academia.edu/34113863/DESA_KRISIK?auto=download
- PHDI-Jatim. (2010). Pura Kabupaten Blitar. Retrieved from <http://phdijatim.blogspot.com/2010/07/pura-kabupaten-blitar.html>
- Prasetiawati, E. (2017). Menanamkan Islam Moderat untuk Menanggulangi Radikalisme di Indonesia. *FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 2(2), 523–570. <https://doi.org/10.25217/JF.V2I2.152>
- Pura-Agung-Arga-Sunya. (2019). No Title. Retrieved November 20, 2019, from Facebook website: <https://www.facebook.com/puraagung.argasunya>.
- Setyawan, H. B. (2012). Babad Desa Krisik. Retrieved from <https://desakrisik.wordpress.com/2012/06/23/babad-desa-krisik/>
- Sukarma, I. W. (2016). Tri Hita Karana Theoretical Basic of Moral Hindu. *International Journal of Linguistics, Language and Culture*, 2(3). <https://doi.org/10.21744/ijllc.v2i3.230>
- Suryan, S. (2017). Toleransi Antarumat Beragama: Perspektif Islam. *Jurnal Ushuluddin*, 23(2), 185. <https://doi.org/10.24014/jush.v23i2.1201>

- Suryana, T. (2011). Konsep dan aktualisasi kerukunan antar umat beragama. *Pendidikan Agama Islam -Ta'lim*, 9(2).
- Takdir, M. (2017). Model-Model Kerukunan Umat Beragama Berbasis Local Wisdom (Potret Harmonisasi Kebhinnekaan di Nusa Tenggara Timur). *TAPIS*, 1(1).
- Vansina, J. (2014). *Tradisi Lisan Sebagai Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Wulandari, R. (2017). Tradisi Mengibung (Studi Kasus Sinkretisme Agama di Kampung Islam Kapaon Bali). *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*, 2(1). <https://doi.org/10.25273/gulawentah.v2i1.1358>
- Zuhdi, M. H. (2011). Visi Islam Rahmatan Lil 'Alamin: Dialektika Islam Dan Peradaban. *Akademika Jurnal Pemikiran Islam*, 16(1), 149–170.

Informan:

Ahmad Riyanto, Wakil Ketua NU Krisik

Atik Wigiati, Fatayat NU Krisik/Kasun Krisik

Rika Santika Dewi, WHDI

Muji Dwi Astutik, Muslimat Ranting

Priyoko, Pengurus Pura Arga Sonya

Bonari, Ketua Darmayuwana

Suwari, PHDI

Riyatin, Pengurus WHDI

Indarsih, Pengurus Pura Arga Sonya

Hari Budi Setyawan, Pemerintah Desa

Khoirul Anam, Perwakilan Tokoh Pemuda Muslim, Warga Tetangga Desa Krisik

Asip Hasani, Wartawan Jakarta Pos

Samsul Hadi, Wartawan Surya Pos dan Tribunnews

Wakidi, Sesepeuh Desa Krisik